

02

04

10

GOVERNMENT TODAY
Gaduh Penugasan Polisi di Jabatan Sipil
Pemerintah Bakal Terbitkan PP, Rampung Januari 2026NUSANTARA
Kredit Nganggur di Bank Tembus Rp 2.500 TriliunLISTSTYLE
Warna Tahun 2026 Bak Awan Berdansa

JAKSA-JAKSA DITANGKAP KPK

OTT Tangerang, Bekasi hingga Hulu Sungai Utara

Operasi Tangkap Tangan atau OTT yang digeber Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepekan terakhir memunculkan fakta pilu. Setidaknya di tiga lokasi berbeda yaitu Tangerang, Bekasi hingga Hulu Sungai Utara (HSU), beberapa jaksa ikut terjaring. Di Kabupaten HSU, Kalimantan Selatan, pada Kamis (18/12/2025) operasi berkaitan dugaan pemerasan penanganan perkara. Dari pemeriksaan, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka yaitu Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Utara Albertinus Parlinggoman Napitupulu; Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Utara Asis Budiyanto; serta Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Utara Tri Taruna Fariadi. Mirisnya, Tri Taruna memberikan perlawanan dan kabur masuk hutan saat KPK hendak menangkapnya. Komisi anti-rasuah pun menjadikannya buronan dan akan menerbitkan daftar pencarian orang atau DPO. Terbaru, Kejaksaan Agung (Kejagung) mengatakan telah mencopot ketiganya. KPK juga melakukan operasi tangkap tangan di dua tempat dalam waktu yang hampir berbarengan, yaitu di Tangerang dan Bekasi. Dua OTT itu dikabarkan sama-sama menangkap jaksa. Deretan jaksa yang ditangkap KPK menurut Komisi Kejaksaan, membuktikan adanya permasalahan dalam pengawasan di internal Kejaksaan. Di sisi lain mencuat isu, relasi Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan tengah berada dalam tensi tinggi. Korps Adhyaksa disebut melayangkan keberatan serius hingga mengancam tidak memperpanjang masa penugasan jaksa penuntut umum (JPU) yang selama ini diperlakukan di lembaga antirasuah.

BACA HAL 11...

JAKSA KENA OTT KPK

Kasus Bekasi

- KPK menyegel rumah pribadi Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Eddy Sumarman, di Cikarang, Jawa Barat.
- Penyegelan rumah tersebut terkait dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang.
- Bupati dan ayahnya menerima aliran dana sebesar Rp9,5 miliar dari ijon proyek. KPK juga mencatat di sepanjang tahun 2025, Ade mendapat penerimaan lainnya yang berasal dari sejumlah pihak mencapai Rp4,7 miliar.

Kasus Tangerang (Rabu, 17/12/2025)

OTT oleh KPK dan dilimpahkan penanganan ke Kejaksaan Agung:

- 5 tersangka ditetapkan
 - HMK--Kasi Pidum Kejari Kabupaten Tangerang
 - RV--Jaksa Penuntut Umum Kejati Banten
 - RZ--Kasubag Daskrimti Kejati Banten
 - DF--Pengacara
 - MS--Penerjemah / ahli bahasa
- Dugaan pemerasan terhadap WNA Korsel
- Nilai pemerasan mencapai Rp941 juta**

Kasus Hulu Sungai Utara (HSU)

Terpat di tangani KPK:

- 3 tersangka:
 - Kajari HSU Albertinus P. Napitupulu
 - Kasi Intel Asis Budianto
 - Kasi Datun Tri Taruna Fariadi (kabur)
- Modus: pemerasan agar laporan LSM tidak diproses
- Total aliran dana **± Rp2,64 miliar**



HMK

Kasi Pidum Kejari Kabupaten Tangerang

RV

Jaksa Penuntut Umum Kejati Banten

RZ

Kasubag Daskrimti Kejati Banten

ALBERTINUS P NAPITUPULU

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Hulu Sungai Utara

ASIS BUDIANTO

Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel)

**Peraturan Pemerintah (PP)
terkait menata ulang
jabatan sipil yang dapat diisi
oleh personel Polri**

- Ditargetkan rampung Januari 2026.
- Alasan PP dipilih karena lebih cepat dan memberi kepastian hukum dibanding revisi undang-undang.
- PP disusun untuk menyelesaikan persoalan hukum pascaputusan MK dan polemik Perpol Nomor 10 Tahun 2025 agar tidak meluas. Dasar hukum penyusunan PP merujuk pada:
 1. Pasal 19 UU ASN yang membuka peluang jabatan ASN tertentu diisi TNI/Polri dengan pengaturan melalui PP.
 2. Pasal 28 ayat (4) UU Polri yang mengatur anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah pensiun atau mengundurkan diri.
- PP akan mengatur secara rinci jabatan sipil yang memiliki keterkaitan dengan fungsi kepolisian dan dapat diisi anggota Polri.
- PP juga akan menggantikan sekaligus menata ulang ketentuan yang sebelumnya diatur dalam Perpol Nomor 10 Tahun 2025.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan pemerintah memilih menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) alih-alih langsung merevisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) dalam mengatur penugasan anggota Polri di luar struktur kepolisian. Yusril mengatakan langkah penyusunan PP

Gaduh Penugasan Polisi di Jabatan Sipil **PEMERINTAH BAKAL TERBITKAN PP, RAMPUNG JANUARI 2026**

Polemik penugasan anggota Polri di jabatan sipil yang memicu perdebatan publik pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) akan ditangani pemerintah melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP). Pemerintah memilih jalur regulasi turunan alih-alih merevisi Undang-Undang Polri, dengan alasan efektivitas dan kepastian hukum. PP tersebut disiapkan untuk menata ulang jabatan sipil yang dapat diisi personel Polri dan ditargetkan rampung pada Januari 2026.



ditempuh untuk menyelesaikan persoalan hukum pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Pemerintah saat ini fokus menuntaskan problem pasca Putusan MK dan polemik terhadap Perpol Nomor 10 Tahun 2025 agar tidak melebar ke mana-mana. Penyusunan

PP jelas akan lebih cepat dibanding menyusun UU. Karena itu, Presiden memilih pengaturan melalui PP," ujar Yusril kepada wartawan, Minggu (21/12/2025).

Yusril menjelaskan, Pasal 19 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

(UU ASN) secara tegas mengatur bahwa jabatan ASN tertentu dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota Polri, dengan ketentuan lebih lanjut harus diatur dalam Peraturan Pemerintah. Dengan demikian, penyusunan PP menjadi dasar hukum yang jelas dan konstitutional.

Sementara Pasal 28 ayat (4) UU Polri menegaskan bahwa anggota Polri dapat menduduki jabatan birokrasi sipil di luar kepolisian jika sudah pensiun atau mengundurkan diri. Menurutnya, PP terbaru tersebut akan mengatur jabatan apa saja yang memiliki sangkut paut dengan kepolisian sehingga bisa diisi personel Polri.

"PP yang disusun ini dimaksudkan untuk melaksanakan Pasal 28 ayat (4) UU Polri, putusan Mahkamah Konstitusi, sekaligus Pasal 19 UU ASN. PP tersebut nantinya akan menggantikan dan sekaligus menata ulang jabatan-jabatan apa saja yang dapat diisi oleh anggota Kepolisian yang sebelumnya diatur dalam Perpol Nomor 10 Tahun 2025," jelasnya.

Yusril kemudian menyenggung ihwal aturan jabatan personel TNI yang sudah diatur di tingkat UU dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). Dia menegaskan bahwa pilihan instrumen hukum tersebut merupakan kebijakan pembentuk undang-undang.

"UU TNI memilih mengaturnya langsung dalam undang-undang. Dengan PP juga tidak ada masalah. Meski Pasal 28 ayat (4) UU Polri tidak secara eksplisit memerintahkan pengaturan lebih lanjut melalui PP, namun berdasarkan Pasal 5 UUD 1945, Presiden berwenang menetapkan PP untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya," kata Yusril.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengucapkan terima kasih karena pemerintah akan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) guna menyelesaikan polemik terkait Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025. (wud,kcm,rls/dya)

Penolakan Pakar terhadap Perpol Penempatan 17 Jabatan Sipil

RENCANA menaikkan status aturan penempatan polisi aktif di 17 kementerian dan lembaga menuai penolakan dari sejumlah pakar hukum dan kalangan akademisi. Aturan yang tertuang dalam Perpol tersebut tak bisa dijadikan landasan bagi penerbitan Peraturan Pemerintah maupun revisi UU Polri.

Ahli Hukum Tata Negara, Mahfud MD menilai penerbitan Perpol tersebut bertentangan dengan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang ASN. "UU Polri sama sekali tidak menyebut adanya jabatan sipil yang bisa ditempati anggota Polri kecuali mengundurkan diri atau pensiun," ujar Mahfud.

Mahfud menilai Perpol itu bertentangan dengan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang ASN. Musababnya dalam regulasi tersebut, polisi aktif dimungkinkan bertugas di luar institusi tanpa perlu pensiun. "Jadi Perpol itu tidak ada dasar hukum dan konstitusionalnya," kata anggota Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian itu.

Penempatan polisi aktif di 17 pos kementerian dan lembaga diatur

dalam Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggota Polri yang Melaksanakan Tugas di Luar Struktur Organisasi. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menekan beleid tersebut pada 16 Desember 2025.

Akademisi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Herlambang P. Wiratraman menyatakan, Perpol Nomor 10 Tahun 2025 tidak tepat secara kaidah hukum. Musababnya beleid tersebut hanya dirumuskan dalam bentuk aturan institusi dan bukan dalam skala undang-undang.

Menurut Herlambang, kepolisian tidak bisa merumuskan aturan internal untuk merespon hasil Putusan MK. Kedua regulasi tersebut memiliki kedudukan yang berbeda. "Putusan MK itu level pengaturannya setara Undang-Undang" ujar Herlambang pada Ahad, 21 Desember 2025.

Usul untuk menaikkan status Perpol menjadi PP juga dinilai bermasalah. Menurut Herlambang, materi soal penempatan polisi aktif di institusi sipil tidak dapat diatur di tingkat PP. Musababnya beleid itu

mengatur kewenangan baru yang tidak diatur di peraturan sebelumnya.

Herlambang menjelaskan, pembentukan PP biasanya merupakan amanat langsung dari Undang-Undang pendahulu atau delegate legislation. PP juga bisa berisikan aturan implementatif suatu Undang-Undang. "(Perpol) ini bukan keduanya," ucap Herlambang lewat pesan suara.

Oleh karena itu, Herlambang menyarankan Kapolri untuk segera menganulir Perpol tersebut. Pembatalan regulasi dilakukan sembari menunggu proses pembahasan di tingkat Undang-Undang. "Tanpa perlu desakan apalagi gugatan uji materi," kata Herlambang.

Herlambang mengatakan, penempatan polisi aktif di institusi sipil sebaiknya diatur lewat revisi Undang-Undang Polri. Namun, dia mewanti-wanti agar proses pembahasan regulasi tersebut bisa berlangsung secara terbuka. Tujuannya untuk memastikan agar substansi aturan itu tidak bertentangan dengan hasil Putusan MK. (kcm,ist/dya)

Hasil Rapimnas Golkar PILKADA LEWAT DPRD DAN KOALISI PERMANEN

RAPAT Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Partai Golkar Tahun 2025 menghasilkan sepuluh keputusan strategis yang dirumuskan dalam rekomendasi dan pernyataan politik. Dua isu utama adalah usulan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui dewan perwakilan rakyat daerah serta dorongan pembentukan koalisi permanen di antara partai politik.

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan seluruh pembahasan dalam rapimnas bersifat internal dan menjadi bagian dari konsolidasi organisasi guna memperkuat kesiapan partai menghadapi dinamika politik nasional.

"Semua pembahasan dalam rapimnas ini bersifat internal, sebagai bagian dari konsolidasi organisasi untuk memastikan Partai Golkar tetap solid dan siap menghadapi tantangan ke depan," ujar Bahlil setelah menutup Rapimnas I Golkar 2025 di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Sabtu (20/12/2025).

Dalam rilis Tim Media Golkar dilihat Minggu (31/12/2025), disebutkan bahwa partai berlambang pohon beringin itu mengusulkan agar mekanisme pilkada dilakukan melalui DPRD. Golkar menilai skema tersebut bentuk kedaulatan rakyat dengan tetap menitikberatkan keterlibatan dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan.

Kedua, Golkar merekomendasikan penyempurnaan sistem pemilu proporsional terbuka. Perbaikan diarahkan pada aspek teknis penyelenggaraan; kelembagaan penyelenggara; serta tata kelola pemilu guna mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.

Menurut Bahlil, perlu ada perbaikan teknis dari penyelenggaraan sampai dengan tata kelola sistem tersebut, agar tercipta Pemilu yang jujur dan adil.

"Terkait dengan pelaksanaan Pemilu, Partai Golkar merekomendasikan perbaikan dan penyempurnaan sistem proporsional terbuka dengan memperbaiki aspek teknis penyelenggaraan," ujarnya.

Ia menambahkan, Partai Golkar memandang pentingnya penguatan peran masyarakat sipil (civil society) dan masyarakat algoritma (algorithm society) sebagai pilar penting dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

"Memperluas ruang partisipasi politik publik yang lebih bermakna (meaningful participation), termasuk dalam menciptakan ruang digital yang sehat, berkualitas, dan bertanggung jawab," katanya.

Keputusan ketiga, rapimnas juga menegaskan pentingnya transformasi



Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia (tengah) bersama Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji (kiri) dan Bendahara Umum Partai Golkar Sari Yuliati (kanan) saat Rapimnas Partai Golkar di Jakarta, Sabtu (20/12/2025). (Dok. Partai Golkar)

pola kerja sama politik melalui pembentukan koalisi permanen. Golkar memandang koalisi tidak lagi cukup bersifat taktis dan jangka pendek, tapi perlu dibangun secara ideologis dan strategis, berbasis kesamaan platform serta agenda kebijakan.

"Koalisi permanen ini tidak hanya dibangun untuk memenangi

kontestasi pemilihan presiden, tapi dilembagakan sebagai bentuk kerja sama politik yang mengikat di parlemen dan pemerintahan," demikian Tim Media Golkar menulis.

Di luar isu elektoral, pada keputusan keempat, rapimnas menyampaikan empati dan keprihatinan kepada masyarakat yang terdampak bencana alam di Aceh,

Pengamat Curigai Manuver Elit Politik Belaka

DIREKTUR Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menduga wacana pemilihan kepala daerah baik gubernur maupun bupati/wali kota—oleh Presiden dan DPRD merupakan bagian dari manuver politik elit yang telah dirancang secara matang.

Ia menilai, gagasan tersebut tidak muncul secara sporadis, melainkan merupakan strategi politik yang sudah dikomunikasikan di tingkat pimpinan partai.

Menurut Fernando, wacana tersebut tidak hanya datang dari Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhamimin Iskandar. Ia meyakini, ketua umum partai politik lain, khususnya yang tergabung dalam koalisi pemerintahan, berpotensi menyuarakan gagasan serupa.

"Gagasan yang dilontarkan tersebut tentu sudah disepakati oleh pimpinan partai politik, terutama yang saat ini tergabung dalam koalisi pemerintahan, berpotensi menyuarakan gagasan serupa."

Minggu (21/12/2025).

Fernando menilai, pembahasan soal mekanisme pemilihan kepala daerah oleh Presiden dan DPRD tidak akan berhenti pada tataran wacana atau pembahasan di DPR. Ia menduga, proses tersebut dapat berlanjut pada pembagian jabatan kepala daerah sebagai bagian dari kesepakatan politik antarpertai.

"Sangat mungkin sudah dibagi sebagai kesepakatan bersama," tuturnya.

Ia juga menyoroti alasan yang kerap disampaikan sebagian elit politik, yakni penghematan anggaran negara, sebagai dasar perubahan mekanisme Pilkada. Fernando menilai, dalih efisiensi anggaran tidak dapat dijadikan pembernan untuk menghilangkan hak pilih rakyat dalam menentukan pemimpinnya di daerah.

"Memang secara hitung-hitungan akan ada penghematan anggaran karena biaya Pilkada menjadi lebih kecil jika kepala daerah ditunjuk Presiden dan dipilih DPRD. Namun tidak ada

Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kelima, Golkar juga menegaskan kembali doktrin Karya Kekaryaan sebagai instrumen penting dalam mewujudkan Asta Cita menuju Indonesia 2045.

Untuk keputusan keenam, Golkar turut mendukung kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, serta kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat posisi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global. Dukungan tersebut mencakup peran Indonesia dalam mendorong penyelesaian krisis kemanusiaan di Gaza dan perdamaian di Timur Tengah.(gus,rls,tmo/dya)

TAHAPAN EVOLUSI PILKADA:

Masa Orde Baru

(Pilkada Tidak Langsung):

Kepala daerah dipilih oleh DPRD, bukan oleh rakyat secara langsung.

Era Reformasi (Pilkada Langsung):

- **Payung Hukum:** UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- **Ciri Khas:** Rakyat memiliki langsung kepala daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) pertama kali tahun 2005. Memperkuat legitimasi, namun muncul isu politik uang dan sengketa hasil.

Pilkada Serentak (Gelombang Pertama):

- **Payung Hukum:** UU No. 1 Tahun 2015 (yang menetapkan Perppu No. 1/2014 menjadi UU).
- **Ciri Khas:** Pilkada pertama kali serentak di berbagai daerah pada 2015, meminimalkan biaya dan dinamika pemilu terpisah.

Pilkada Serentak Nasional

(Puncak Evolusi):

- **Payung Hukum:** UU No. 10 Tahun 2016 (Perubahan Kedua atas UU No. 1/2015).
- **Ciri Khas:** Mempercepat keserentakan di seluruh Indonesia pada November 2024, berdasarkan amanat putusan MK No. 24/2013, untuk efisiensi dan konsolidasi demokrasi.

Payung Hukum Utama Saat Ini:

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016: Mengatur perubahan UU Pilkada, menjadi landasan hukum Pilkada serentak, termasuk jadwal nasional 2024

jaminan korupsi akan hilang dan juga tidak ada jaminan terpilihnya pemimpin daerah yang berkualitas," jelasnya.

Fernando menegaskan, upaya menghapus partisipasi langsung rakyat dalam Pilkada merupakan tindakan yang semena-mena dan berpotensi melemahkan demokrasi lokal. Menurutnya, Pilkada langsung masih menjadi instrumen penting bagi rakyat untuk mengontrol kekuasaan dan menentukan arah pembangunan daerah.(ist,tin/dya)

KREDIT NGANGGUR DI BANK TEMBUS RP 2.500 TRILIUN

Di tengah perbaikan laju pertumbuhan kredit, nyatanya kredit menganggur yang masih ada di perbankan justru bertambah. Artinya, banyak pelaku usaha belum memanfaatkan fasilitas kredit yang dimiliki. Per November 2025, fasilitas pinjaman yang belum dicairkan mencapai Rp 2.509,4 triliun atau 23,18% dari plafon kredit yang tersedia. Bandingkan dengan posisi Agustus 2025 yang tercatat senilai Rp 2.372 triliun. Sementara itu, pada bulan Oktober 2025, kredit menganggur di perbankan tercatat senilai Rp 2.450 triliun. Artinya, dalam sebulan ada peningkatan sekitar Rp 50 triliun.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merespons kredit yang belum disalurkan perbankan (undisbursed loan) meningkat dalam beberapa bulan terakhir dan menyentuh Rp 2.500 triliun. Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, tingginya pertumbuhan kredit menganggur menunjukkan adanya kelonggaran tarik kredit ke depan.

Dian mengatakan kelonggaran tersebut dapat dimanfaatkan oleh debitur dalam melakukan ekspansi usaha. Untuk diketahui, kredit menganggur meningkat dalam beberapa bulan terakhir dari Rp 2.372 triliun pada Agustus 2025 naik menjadi Rp 2.450 triliun per Oktober 2025 dan meningkat Rp 2.509,4 triliun per November 2025.

"Dengan adanya komitmen kredit/pembayaran yang besar tersebut, terdapat potensi peningkatan realisasi kredit di masa mendatang," ujar Dian dalam keterangannya, dikutip Minggu (21/11/2025).

Dian menilai dalam hal kondisi ekonomi membaik dan kepercayaan pelaku usaha meningkat, maka pencairan kredit dapat meningkat dan mendorong pertumbuhan sektor riil.

Pertumbuhan fasilitas kredit yang



(Ilustrasi) Karyawan menghitung uang rupiah di salah satu bank di Jakarta. (Dok)

belum disalurkan ini diperkirakan akan mengalami moderasi seiring dengan penyesuaian strategi bisnis bank. Dengan posisi ini, sektor perbankan nasional dinilai tetap memiliki ruang untuk mendukung pembelian produktif, selama disertai dengan pendekatan yang cermat terhadap risiko dan arah kebijakan ekonomi ke depan.

Menurutnya, pemulihan beberapa sektor ekonomi serta dukungan optimal dari kebijakan fiskal dan moneter dapat akan meningkatkan efek multiplier ke konsumsi rumah tangga dan investasi dunia usaha.

Adapun beberapa faktor yang dapat mendorong pertumbuhan kredit/pembayaran, antara lain transmisi kebijakan moneter yang semakin membaik, tren penurunan suku bunga pinjaman, dan percepatan belanja pemerintah/investasi swasta.

Di sisi lain, PMI Manufaktur Indonesia posisi November 2025 berekspansi sebesar 53,50 atau membaik dibandingkan Oktober 2025 (51,20), mengidentifikasi telah terjadi peningkatan aktivitas perekonomian yang jika tetap berlanjut, maka pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2025 masih

LIKUIDITAS PERBANKAN LONGGAR, EKSPANSI KREDIT 2026 TERBUKA LEBAR

Latar Belakang Kunci:

- LDR Industri:** Berada di angka 84%, sementara batas yang ditetapkan OJK & BI adalah 91%. Hal ini berarti terdapat ruang likuiditas yang besar untuk ekspansi.
- Kebijakan Pemerintah & BI:** Adanya kebijakan yang bersifat pro-growth.
- Aktivitas Moneter:** Upaya moneter dilakukan untuk menjaga agar likuiditas tetap memadai (ample).

Dorongan Kebijakan Moneter:

- Penurunan BI Rate.
- Relaksasi GWM (Giro Wajib Minimum).
- Normalisasi SRBI (Sekuritas Rupiah Bank Indonesia), yang berdampak pada bank dapat menekan cost of fund lebih rendah dibandingkan tahun 2024.

Tantangan Serapan Kredit:

- Tingginya undisbursed loan karena debitur masih bersikap wait&see.
- Pengaruh daya beli masyarakat kelas menengah kebawah.
- Likuiditas yang tersedia belum terserap secara optimal.

Fondasi Perbankan Tetap Kuat:

- CAR (Capital Adequacy Ratio): ±26%.
- NPL (Non-Performing Loan): 2,2%-2,4%.
- Sinergi antara kebijakan fiskal-moneter dan APBN di tahun 2026 diharapkan dapat menggerakkan sektor riil, sehingga kredit perbankan dapat mengalir lebih deras.

Purbaya Soroti Duit Bank Banjiri SRBI

TERNYATA, surat utang yang dikeluarkan Bank Indonesia (BI) yakni Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) justru menghambat pergerakan ekonomi nasional.

Karena, perbankan lebih memilih untuk memborong SRBI ketimbang mengelontorkan kredit kepada pelaku usaha. Alasannya macam-macam, bisa jadi karena perbankan khawatir dengan kredit macet. Di saat perekonomian nasional belum membaik.

Sehingga wajar, beberapa waktu lalu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi sadewa kecewa berat. Ketidaksinkronan antara kebijakan fiskal dan moneter, membuat pemulihannya peredaran uang di masyarakat, belum sepenuhnya pulih.

Padahal stimulus fiskal telah dijalankan agresif untuk mendorong pertumbuhan. Jika kredit bank seret

itu sama saja dengan peredaran uang primer (M0) yang rendah. Padahal, jika peredaran M0 tinggi, potensial mendorong ekonomi berputar cepat.

"Sekitar Rp1.000 triliun dana perbankan, saat ini, parkir di SRBI dan instrumen operasi pasar terbuka lainnya. Sehingga, likuiditas yang seharusnya dapat mengalir ke sektor produktif, menjadi terhambat," kata Menkeu Purbaya, Jakarta, dikutip Minggu (21/12/2025).

Asal tahu saja, SRBI atau Sekuritas Rupiah Bank Indonesia merupakan instrumen operasi moneter yang diterbitkan oleh BI untuk mengelola likuiditas dan memperkuat transmisi kebijakan suku bunga.

Instrumen ini pertama kali diumumkan oleh Gubernur BI Perry Warjiyo pada Agustus 2023 sebagai senjata tambahan dalam menjaga stabilitas rupiah di tengah tekanan dolar AS dan gejolak pasar global.

Per November 2025, kepemilikan bank di SRBI tercatat Rp618 triliun. Angka ini menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah SRBI yang diterbitkan 2023.

Jika dilihat secara bulanan, kepemilikan bank di SRBI meningkat sekitar 2,82 persen. Jika dibandingkan dengan akhir 2025, kenaikannya mencapai 10,36 persen.

Untuk suku bunga SRBI, sudah mengalami penurunan sejak awal tahun. Untuk tenor 6, 9, dan 12 bulan, bunga SRBI menurun masing-masing 226 bps, 226 bps dan 228 basis point (bps) sejak awal Januari 2025, menjadi 4,90 persen; 4,94 persen; dan 4,98 persen pada 12 Desember 2025.

Di sisi lain, BI juga melakukan ekspansi likuiditas dengan menurunkan posisi instrumen moneter SRBI dari Rp916,97 triliun pada awal 2025 menjadi Rp735,67 triliun pada 16 Desember 2025. (ini,ist/dya)

dapat tumbuh meningkat sehingga juga mendorong permintaan terhadap kredit perbankan.

Sejalan dengan hal tersebut, prospek perekonomian semakin membaik tecerminkan dari Indeks Keyakinan Konsumen November 2025 yang tetap berada di zona optimis sebesar 124,03, meningkat dibandingkan Oktober 2025 (121,22).

"OJK secara aktif senantiasa berkoordinasi dengan Pemerintah dan stakeholders lainnya termasuk yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terkait berbagai kebijakan dalam rangka melakukan monitoring dan melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional," imbuh Dian.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan, permintaan kredit hingga saat ini masih lemah, membuat pertumbuhan kredit belum mampu naik cepat di sektor lembaga jasa keuangan. (wid,ktn,rls/dya)

Banjir Lahar Semeru Lumpuhkan Akses Antarkecamatan, Penambang Pasir Terjebak di Sungai Regoyo

LUMAJANG-Banjir lahar hujan Gunung Semeru kembali menerjang wilayah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, pada Minggu (21/12/2025) sore. Hujan dengan intensitas tinggi di kawasan puncak gunung tertinggi di Pulau Jawa itu memicu aliran material vulkanik yang meluncur deras ke sejumlah sungai, melumpuhkan akses antarkecamatan, serta menempatkan warga, khususnya para penambang pasir, dalam situasi yang membahayakan nyawa.

Salah satu peristiwa paling dramatis terjadi di aliran Sungai Regoyo, Desa Gondoruso, Kecamatan Pasirian. Seorang penambang pasir dilaporkan terjebak di tengah sungai saat banjir lahar melintas dengan arus yang sangat deras. Peristiwa tersebut terkam dalam video amatir warga dan sempat viral di media sosial.

Dalam rekaman itu, tampak seorang pria bertahan di tengah sungai sambil berlindung di balik batu berukuran besar. Ia berupaya melindungi diri dari terjangan lumpur,

pasir, dan bebatuan yang terbawa aliran lahar hujan Gunung Semeru.

Berdasarkan laporan Pos engamat Gunung Api (PPGA) Semeru dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), banjir lahar mulai terkam sekitar pukul 13.00 WIB. Aktivitas tersebut tercatat di seismograf dengan amplitudo maksimum mencapai 45 milimeter, menandakan kuatnya aliran material vulkanik dari hulu.

Warga yang nyaris menjadi korban tersebut diketahui bernama Ismail atau akrab disapa Mail, seorang penambang pasir asal Desa Bago, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang. Menurut keterangan warga, Mail saat itu masih berada di area sungai dan berusaha menepi setelah mendapatkan informasi adanya potensi banjir lahar.

Namun, derasnya aliran lahar datang lebih cepat dari perkiraan. Sebelum sempat keluar dari alur sungai, arus banjir keburu membesar. Mail pun bertahan sekuat tenaga di tengah sungai dengan berpegangan

pada batu besar hingga aliran lahar perlahan surut.

"Yang terjebak tadi Pak Mail, orang (Dusun) Randuan. Orangnya selamat dan langsung pulang," ujar Afan, salah satu warga setempat, Minggu (21/12/2025).

Selain membahayakan keselamatan warga, banjir lahar hujan juga menyebabkan gangguan serius pada infrastruktur dan aktivitas masyarakat. Satu unit truk dilaporkan sempat terjebak di tengah Sungai Regoyo. Beruntung, sopir truk tersebut berhasil menyelamatkan diri sebelum arus semakin deras.

Tak hanya itu, sebuah alat berat jenis ekskavator dilaporkan hanyut terbawa banjir lahar. Warga menduga alat berat tersebut sebelumnya sudah tertimbun material erupsi Gunung Semeru yang terjadi pada 19 November 2025, sehingga tidak sempat diamankan saat banjir lahar kembali terjadi.

Aliran lahar hujan Gunung Semeru diketahui mengarah ke sejumlah sungai

di sisi tenggara gunung, membawa material erupsi yang masih panas. Kondisi ini memicu terjadinya letusan sekunder di beberapa titik aliran sungai, menambah risiko bagi warga yang beraktivitas di sekitar daerah aliran sungai (DAS).

Dampak paling nyata dari peristiwa ini adalah lumpuhnya akses transportasi antarkecamatan. Jembatan limpas yang ang menghubungkan Kecamatan Pasirian dan Kecamatan Tempursari tertutup lumpur, pasir, dan bebatuan. Akibatnya, kendaraan roda dua maupun roda empat tidak dapat melintas hingga kondisi benar-benar dinyatakan aman.

Perangkat Desa Gondoruso, Devi, mengatakan banjir lahar menyebabkan akses menuju sedikitnya tiga dusun di wilayahnya terputus total.

"Dampaknya akses terputus karena banjir menutupi jembatan limpasan. Sekarang warga terpaksa menunggu banjir surut untuk bisa melintas karena itu satu-satunya akses," ujar Devi.(tin,ant/dya)

Student Inbound UB-Universiti Malaya: Lakukan Observasi Operasional di Pelabuhan Perikanan Pondokdadap

MALANG - Mahasiswa Universitas Brawijaya (UB) bersama Universiti Malaya melaksanakan kunjungan observasi di UPT Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Pondokdadap, Kabupaten Malang Selasa (9/12/2025). Kegiatan ini dalam rangka kegiatan Student Inbound.

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari rangkaian agenda akademik kedua universitas di wilayah Malang Selatan, dengan fokus pada pengenalan langsung aktivitas operasional pelabuhan perikanan.

Selama kunjungan, para mahasiswa melakukan observasi terhadap proses pendaratan ikan yang berlangsung di dermaga pelabuhan, didampingi langsung oleh petugas UPT PPP Pondokdadap. Mahasiswa dikenalkan pada jenis armada kapal, potensi ikan hasil tangkapan, serta alat tangkap yang digunakan oleh nelayan setempat.

Selain itu, mereka juga mengunjungi kios ikan nelayan untuk



mengamati hasil pendaratan ikan terkini. Pada saat kunjungan, hasil tangkapan didominasi oleh ikan karang dan ikan pelagis kecil yang ditangkap menggunakan kapal jukung dan purse seine.

Melalui kegiatan ini, mahasiswa memperoleh pemahaman langsung mengenai sistem pengelolaan pelabuhan perikanan serta dinamika aktivitas perikanan tangkap di pesisir Malang Selatan.

Petugas UPT PPP Pondokdadap

memberikan penjelasan terkait alur pendaratan ikan, penanganan hasil tangkapan, hingga mekanisme distribusi ikan menuju Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Interaksi langsung dengan aktivitas pelabuhan diharapkan mampu memperkaya wawasan akademik sekaligus memberikan gambaran nyata praktik perikanan di lapangan.

Selain observasi teknis, kegiatan Student Inbound ini juga menjadi wadah pertukaran pengetahuan dan

pengalaman antar mahasiswa lintas negara. Diskusi yang berlangsung di lokasi mencakup perbandingan sistem perikanan, jenis armada, serta karakteristik sumber daya ikan di masing-masing negara.

Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan memiliki perspektif yang lebih luas terhadap isu pengelolaan perikanan, khususnya dalam konteks keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya pesisir.

UPT PPP Pondokdadap menyambut baik kunjungan akademik tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan pendidikan dan penelitian. Pelabuhan perikanan sebagai lokasi pembelajaran lapang dinilai dapat memperkuat sinergi antara dunia akademik dan institusi pemerintah.

Melalui program Student Inbound ini, diharapkan terjalin kerja sama berkelanjutan dalam bidang pendidikan, riset, serta pengembangan sumber daya manusia di sektor kelautan dan perikanan.(adv)

Jelang Libur Nataru, 700 Jip Wisata Bromo Ditargetkan Jalani Pemeriksaan Kelaikan Gratis

MALANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang menargetkan sebanyak 700 unit jip wisata Bromo menjalani pemeriksaan kelaikan kendaraan atau ramp check secara gratis.

Hal ini dilakukan menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), sebagai upaya memastikan keselamatan wisatawan yang berkunjung ke kawasan Bromo melalui jalur Kabupaten Malang.

"Secara bertahap, kami bersama Polres Malang melakukan ramp check kendaraan jip wisata Bromo. Tujuannya untuk mengecek kelaikan jalan kendaraannya, kemudian ditempel stiker," ujar Bupati Malang, Sanusi, dikutip pada Minggu (21/12/2025).

Sanusi menjelaskan, pemilik jip wisata juga diwajibkan mengasuransikan kendaraannya dengan skema Rp36 ribu per seat per tahun, yang juga akan mencakup perlindungan bagi penumpang selama perjalanan.

"Sehingga nanti angkutan jip ke Bromo yang dari Kabupaten Malang

itu penumpangnya sudah dijamin asuransi, kelaikan kendaraannya juga terjamin. Harapannya dapat mengurangi risiko-risiko kecelakaan," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Unit Keamanan dan Keselamatan Berlalu Lintas (Kamsel) Satuan Lalu Lintas Polres Malang, Ipda Umar Kiswoyo, menyampaikan pemeriksaan kelaikan kendaraan jip wisata telah dilakukan secara bertahap.

Hingga saat ini, sekitar 400 unit kendaraan telah menjalani ramp check dan akan terus bertambah hingga seluruh kendaraan dalam paguyuban jip wisata TNBTS selesai diperiksa.

"Mudah-mudahan nanti semua dari 700 sekitan itu sudah melaksanakan ramp check dan mempunyai nomor lambung. Nomor ini mencirikan identitas kendaraan, pengemudi, dan pemilik, serta seluruhnya tercover asuransi," tambahnya.

Selain pemeriksaan kendaraan, Pemkab Malang bersama Polres Malang dan Balai Besar TNBTS juga telah berkoordinasi untuk menyiapkan fasilitas pendukung, seperti tempat istirahat dan pos

pelayanan di beberapa titik strategis, termasuk di rest area Gubuk Lakah.

Seluruh kendaraan wisata akan didata sebelum melanjutkan perjalanan menuju kawasan Bromo.

"Kami juga mengingatkan, terutama kendaraan pribadi, agar benar-benar mengecek kondisi kendaraannya sebelum naik ke atas. Untuk kendaraan wisata, kami harapkan sebelum beroperasi sudah terdata semuanya," tegas Umar.

Terkait kendaraan yang belum atau tidak lolos dalam pemeriksaan kelaikan, Umar menyebut hasil ramp check telah dicatat dan akan disampaikan kepada pemilik kendaraan untuk segera dipenuhi sesuai hasil pengecekan.

Ilustrasi: Jip wisata Bromo menjalani pemeriksaan kelaikan kendaraan di Balai Uji KIR Kabupaten Malang, Kecamatan Singosari. (Santi/Lentera)



"Kami semangatnya adalah memberikan keamanan, kenyamanan ke driver, penumpang. Ini jadi yang pertama di Kabupaten Malang. Mungkin nanti kota atau kabupaten lain akan mengikuti," pungkasnya.(Santi/Dya)

Konstruksi Jembatan Muharto Menurun, Pemkot Malang Usulkan Pembangunan ke Pusat



Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPR-PKP) Kota Malang, Dandung Djulharjanto. (Santi/Lentera)

Kawasan Permukiman (PUPR-PKP) Kota Malang, Dandung Julhardjanto, mengatakan usulan tersebut telah disampaikan melalui Direktorat Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

"Bisa dilihat, di bawah jembatan itu kondisi konstruksinya sudah sangat mendesak untuk dilakukan penanganan. Jadi bukan perbaikan, tapi kami mengusulkan pembangunan," ujar Dandung, Minggu (21/12/2025).

Dijelaskannya, pada 2019 Pemkot Malang sempat melakukan perbaikan yang bersifat sementara, yakni pengujian konstruksi tanpa membongkar total jembatan. Saat itu, Jembatan Muharto ditutup untuk kendaraan roda empat dan hanya diperbolehkan dilalui kendaraan roda dua.

Namun karena sifatnya hanya

penanganan sementara, pembangunan ulang dinilai perlu segera dilakukan agar tidak menimbulkan risiko yang lebih besar. Terlebih, Dandung menyebut Jembatan Muharto merupakan jalur yang setiap hari dilalui kendaraan dengan intensitas lalu lintas yang cukup tinggi.

"Faktornya memang karena usia. Jembatan itu sudah berusia lebih dari 30 tahun. Statusnya milik Pemkot Malang, tetapi kami mengusulkan pembangunan sebagai upaya Pemkot di tengah situasi efisiensi anggaran," jelasnya.

Selain Jembatan Muharto Barat, Pemkot Malang juga mengusulkan pembangunan Jembatan Muharto Timur. Menurut Dandung, kedua jembatan tersebut dibangun dalam periode yang sama sehingga kondisi konstruksinya relatif serupa.

Tak hanya itu, satu jembatan lain yang turut diusulkan ke pemerintah pusat adalah Jembatan Glendang Pakem di kawasan Madyopuro. Jembatan tersebut mengalami kerusakan akibat terdampak banjir

besar yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Urgensi pembangunan ketiga jembatan tersebut juga mendapat perhatian DPRD Kota Malang. Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arief Nurakhmad, menyampaikan kebutuhan pembangunan ulang Jembatan Muharto dan dua jembatan lainnya telah dibahas dalam hearing bersama DPUPR-PKP beberapa waktu lalu.

"Oleh karena itu, langkah Pemkot Malang untuk segera berkomunikasi dengan pemerintah pusat sudah tepat. Apalagi memasuki 2026, kondisi anggaran daerah memang sangat terbatas," ujarnya.

Dito menambahkan, persoalan di Jembatan Muharto tidak hanya berkaitan dengan usia konstruksi, tetapi juga adanya korosi yang terjadi di sejumlah bagian.

Kompleksitas persoalan diperparah dengan kondisi lingkungan sekitar, termasuk praktik pembuangan sampah sembarangan yang kerap memicu kemacetan di atas jembatan. (Santi/Dya)

MALANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mengusulkan pembangunan ulang Jembatan Muharto ke pemerintah pusat. Pasalnya, kondisi konstruksi jembatan kian menurun dan sudah mendesak untuk ditangani.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan

MAKIN KACAU, MENDADAK MUNCUL RUSIA DAN CHINA DI PERANG THAILAND-KAMBOJA

Situasi di perbatasan Thailand dan Kamboja makin kacau. Diketahui militer Thailand menyita sejumlah persenjataan berat dalam baku tembak terbaru dan ditemukan rudal antitank berpemandu generasi baru buatan China. Sebelumnya, tentara bayaran dari Rusia juga dilaporkan muncul di perang tersebut.

Keterlibatan teknologi militer casing dalam konflik kawasan Asia Tenggara memicu sorotan luas. Penemuan senjata canggih tersebut menambah daftar kekhawatiran Bangkok terkait jalur pasokan persenjataan yang digunakan di wilayah perbatasan. Dikutip Minggu (21/12/2025), otoritas keamanan Thailand kini tengah menelusuri asal-usul senjata sekaligus kemungkinan adanya aktor eksternal yang ikut bermain di balik eskalasi konflik dua negara bertetangga itu.

Angkatan Darat Kerajaan Thailand memastikan seluruh rudal yang disita kini berada sepenuhnya dalam penguasaan militer dan tidak akan diserahkan ke pihak manapun. Informasi itu disampaikan melalui laporan Thai Public Broadcasting Service (PBS), bersamaan dengan proses investigasi lanjutan mengenai bagaimana senjata tersebut bisa sampai ke area konflik.

Rudal yang diamankan diidentifikasi sebagai GAM-102LR, sistem senjata antitank berpemandu



Orang-orang melihat jembatan yang rusak setelah Thailand melakukan serangan udara di daerah antara provinsi Oddar Meanchey dan Siem Reap di Kamboja. (AFP)

presisi generasi kelima buatan China. Senjata ini dikembangkan oleh perusahaan pertahanan Poly Technologies dan pertama kali diperkenalkan ke publik pada 2018. GAM-102 dapat dioperasikan dari tripod maupun kendaraan tempur, dengan desain yang disebut-sebut menyerupai rudal antitank FGM-148 Javelin milik Amerika Serikat.

Kasus penyitaan rudal ini dinilai penting karena memperlihatkan

semakin tampaknya eksport persenjataan China dalam konflik kawasan. Beijing diketahui telah memasok tank tempur VT-4 kepada Angkatan Darat Kerajaan Thailand berdasarkan perjanjian yang diteken pada 2017.

Kehadiran teknologi militer China di kedua sisi konflik menambah lapisan kompleksitas dalam dinamika keamanan Asia Tenggara.

KONFLIK PERBATASAN THAILAND-KAMBOJA 2025

Kronologi Konflik (Berdasarkan Data Dewan Keamanan PBB, 25 Juli 2025):

MEI:

Terjadi baku tembak di kawasan perbatasan yang menewaskan seorang tentara Kamboja. Hal ini memicu peningkatan tensi antara kedua negara.

16 JULI:

Seorang tentara Thailand terluka akibat ranjau saat sedang berpatroli di perbatasan.

23 JULI:

Lima tentara Thailand kembali menjadi korban luka akibat ranjau. Thailand menuduh Kamboja baru saja memasang ranjau-ranjau tersebut.

24 JULI:

Kamboja disebut memulai serangan dengan menargetkan basis militer Thailand di Provinsi Surin, yang kemudian dibalas oleh pihak Thailand.



Lebih dari Setengah Juta Orang Mengungsi

LEBIH dari setengah juta warga Kamboja terpaksa mengungsi dari rumah mereka akibat dua pekan bentrokan mematikan di perbatasan dengan Thailand, demikian disampaikan Kementerian Dalam Negeri Kamboja pada Minggu (21/12/2025).

Pertempuran yang kembali pecah bulan ini antara dua negara Asia Tenggara tersebut, yang melibatkan penggunaan tank, drone, dan artilleri, telah menewaskan sedikitnya 22 orang di Thailand dan 19 orang di Kamboja, menurut keterangan pejabat setempat.

Konflik ini berakar pada sengketa wilayah terkait penetapan batas perbatasan era kolonial sepanjang sekitar 800 kilometer, serta keberadaan sejumlah reruntuhan kuil kuno yang berada di kawasan perbatasan.

"Saat ini, lebih dari setengah juta warga Kamboja, termasuk perempuan dan anak-anak, mengalami penderitaan berat akibat pengungsian paksa dari rumah dan sekolah mereka untuk menghindari tembakan artilleri, roket, serta serangan udara yang dilakukan oleh

pesawat F-16 Thailand," kata Kementerian Dalam Negeri Kamboja dalam sebuah pernyataan, dikutip dari Hurriyet Daily News.

Pemerintah Kamboja mencatat total warga yang telah dievakuasi mencapai 518.611 orang.

Sementara itu, Bangkok menyatakan sekitar 400.000 orang di Thailand juga mengungsi akibat kembali memanasnya konflik perbatasan tersebut.

Kedua pihak saling menyalahkan atas pecahnya kembali pertempuran dan saling melontarkan tuduhan serangan terhadap warga sipil. Sebelumnya, bentrokan selama lima hari pada Juli lalu menewaskan puluhan orang.

Amerika Serikat, Tiongkok, dan Malaysia sempat memediasi gencatan senjata untuk mengakhiri gelombang pertempuran tersebut, namun kesepakatan itu hanya bertahan singkat.

Pada Oktober, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendukung deklarasi bersama lanjutan antara Thailand dan Kamboja, sembari menyoroti peluang kesepakatan

dagang baru setelah kedua negara sepakat di Kuala Lumpur untuk memperpanjang gencatan senjata.

Namun, Thailand menangguhan kesepakatan tersebut pada bulan berikutnya setelah sejumlah tentaranya terluka akibat ranjau darat saat berpatroli di perbatasan. Bangkok menuduh Kamboja memasang ranjau baru, tuduhan yang dibantah oleh Phnom Penh.

Terbaru, Thailand membombardir sebuah kasino dan sebuah jembatan di Kamboja, menurut laporan media, seiring bentrokan antara kedua negara terus berlanjut menjelang pertemuan khusus para menteri luar negeri ASEAN pada Senin untuk membahas konflik tersebut.

Jet tempur F-16 Thailand menyerang Jembatan O'Chik di Provinsi Oddar Meanchey pada Jumat malam, lapor surat kabar The Nation Thailand dengan mengutip militer Thailand. Jembatan tersebut berada di jalur jalan sekitar 62 kilometer dari perbatasan Thailand dan disebut-sebut menjadi rute pasokan amunisi bagi militer Kamboja.(rtr,ist,dya)

Thailand sendiri telah mengambil sejumlah langkah untuk memutus jalur pasokan dan dukungan logistik bagi pasukan Kamboja. Konflik di perbatasan kini telah memasuki pekan kedua, meskipun Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya mengumumkan bahwa Thailand dan Kamboja telah menyelesaikan gencatan senjata baru pada pekan ini.

Namun, klaim tersebut dibantah oleh kedua negara. Sumber-sumber keamanan mengatakan kepada harian The Nation Thailand bahwa muncul tanda tanya besar mengenai bagaimana persenjataan mahal dan berteknologi tinggi seperti GAM-102 bisa digunakan dalam operasi militer di perbatasan Kamboja.

Meski demikian, PBS melaporkan Selasa (16/12/2025) bahwa pihak Angkatan Darat Thailand menegaskan belum ada bukti yang menunjukkan China secara diam-diam memasok senjata kepada pasukan Kamboja.

Jika kelak terbukti bahwa Kamboja mengoperasikan sistem GAM-102, hal itu akan menjadi penggunaan operasional pertama senjata tersebut oleh militer manapun di dunia, menurut situs analisis pertahanan Jane's. (gus,ist,rtr/dya)



RISET UNGKAP PRIA LEBIH BERISIKO ALAMI KANKER OTAK AKIBAT POLUSI UDARA

Penelitian yang dipublikasikan di PubMed Central menemukan bahwa menghirup polutan udara umum dalam jangka panjang, termasuk benzena, ozon, partikel debu, dan nitrogen oksida, dapat meningkatkan risiko kanker otak ganas dan meningioma. Laki-laki, lebih berisiko mengalami kondisi ini daripada perempuan.

Dikutip dari Times of India, para ilmuwan mengumpulkan data dari lebih dari 100.000 pria dan wanita yang sebagian besar tinggal di wilayah Los Angeles. Data tersebut dianalisis dengan mengamati tingkat paparan polusi udara selama periode 20 tahun. Penelitian jangka panjang ini dilakukan untuk menilai dampak berbagai jenis polutan udara terhadap kesehatan otak, sekaligus mengamati apakah risiko yang ditimbulkan berbeda pada kelompok tertentu berdasarkan jenis kelamin.

Hasil investigasi mengungkapkan bahwa paparan benzena dan partikel udara berukuran besar, seperti PM10, berkaitan dengan peningkatan risiko kanker otak. Namun, temuan ini secara signifikan hanya terlihat pada kelompok pria. Selain itu, penelitian juga menunjukkan bahwa paparan ozon memiliki korelasi dengan peningkatan risiko meningioma pada pria. Meski demikian, para peneliti menegaskan bahwa temuan ini masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut melalui studi

tambahan untuk memastikan hubungan sebab-akibat yang lebih kuat.

Penelitian tersebut turut menguraikan sejumlah alasan biologis yang diduga mendasari perbedaan risiko antara pria dan wanita. Salah satunya merujuk pada eksperimen sebelumnya yang menunjukkan bahwa hewan jantan mengalami aktivasi mikroglia, stres oksidatif, serta respons neuroinflamasi yang lebih besar akibat paparan polutan udara dibandingkan hewan betina. Kondisi ini dapat memicu kerusakan sel saraf dan berpotensi meningkatkan risiko terjadinya kanker otak.

Selain itu, perbedaan dalam jalur antioksidan yang dipengaruhi oleh hormon, serta aktivitas gen penekan tumor, juga diduga berperan dalam meningkatkan kerentanan pria terhadap kanker otak. Model biologis ini sejalan dengan data epidemiologis yang menunjukkan bahwa kanker otak ganas memiliki angka kejadian yang lebih tinggi dan tingkat kelangsungan hidup yang lebih rendah pada pria dibandingkan wanita.

Kekuatan dan Keterbatasan

Keunggulan utama dari penelitian ini terletak pada penggunaan sampel yang besar, durasi tindak lanjut yang panjang, serta penilaian paparan polusi yang dilakukan secara terperinci. Selain itu, studi ini mencakup berbagai kelompok ras dan etnis, serta memanfaatkan data dari registri kanker dan Medicare yang telah tervalidasi, sehingga meningkatkan keandalan hasil penelitian.

Meski demikian, penelitian ini juga

memiliki sejumlah keterbatasan. Di antaranya adalah kurangnya data paparan polusi historis sebelum peserta masuk ke dalam kohort penelitian, tantangan dalam memodelkan paparan benzena secara akurat, serta keterbatasan

kemampuan untuk menganalisis subtipen tumor otak tertentu secara lebih spesifik. Oleh karena itu, para peneliti mendorong adanya studi lanjutan untuk memperkuat dan memperluas temuan ini. (wid, ist/dya)

4 Cara Mengatasi Pencemaran yang Dapat Dilakukan Masyarakat

Pencemaran lingkungan adalah salah satu masalah global yang menjadi concern bersama. Pencemaran lingkungan terbagi menjadi pencemaran air, tanah, dan udara. Untuk mengurangi dampak dari polusi tersebut, terdapat beberapa cara mengatasi pencemaran udara. Mengatasi pencemaran udara bukan hanya tugas pemerintah. Namun, masyarakat juga wajib untuk berkontribusi dalam pencegahan pencemaran lingkungan.

Terdapat beberapa cara mengatasi pencemaran udara yang bisa dilakukan oleh masyarakat.

Mengurangi Penggunaan Kendaraan Bermotor

Cara sederhana yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Sebagai ganti kendaraan pribadi, masyarakat bisa mulai menggunakan kendaraan umum untuk mobilisasi pribadi.

Contohnya menggunakan KRL, LRT, bus, dan sebagainya. Jika jarak yang ditempuh dekat, masyarakat dapat berjalan kaki. Selain mengurangi pencemaran udara juga dapat membuat tubuh lebih sehat.

Menggunakan Kendaraan Ramah Lingkungan

Asap dari kendaraan bermotor merupakan salah satu penyebab polusi udara, terutama di kota-kota besar. Agar dapat mengurangi pencemaran udara, masyarakat dapat menggunakan kendaraan ramah lingkungan seperti sepeda, motor listrik, atau mobil listrik.

Tidak Membakar Sampah

Banyak masyarakat Indonesia yang gemar membakar sampah. Padahal, membakar sampah dapat menyebabkan polusi udara. Untuk mengurangi menumpuknya sampah, masyarakat dapat menggunakan sistem kumpul, pilah, olah atau yang sering disebut sebagai reuse, reduce, recycle.

Mengurangi Rokok

Asap rokok juga merupakan salah satu faktor pencemaran udara, meskipun tidak sebesar asap kendaraan bermotor. Tidak mengonsumsi rokok dapat mengurangi polusi udara dan menjaga kesehatan paru-paru. (ist/dya)



CRISTIANO RONALDO RESMI BERINVESTASI AI PERPLEXITY, STARTUP APA?

Megabintang sepak bola dunia, Cristiano Ronaldo, resmi menanamkan investasinya di startup kecerdasan buatan Perplexity AI. Kabar ini terungkap melalui unggahan CEO Perplexity AI, Aravind Srinivas, di akun Instagram pribadinya, yang menampilkan foto bersama Ronaldo sekaligus mengumumkan sang pesepak bola sebagai investor terbaru perusahaan tersebut. Apa AI Perplexity itu?



Dalam unggahannya, Srinivas menyampaikan rasa bangga dapat bermitra dengan Ronaldo. Ia menilai Ronaldo bukan hanya ikon sepak bola, tetapi juga sosok yang mencerminkan kegigihan, semangat belajar, dan dorongan untuk terus melampaui batas kemampuan diri.

Menurut Srinivas, nilai-nilai tersebut sejalan dengan visi Perplexity AI untuk terus berkembang dan menghadirkan inovasi teknologi yang lebih baik. Kolaborasi antara figur olahraga global dan perusahaan teknologi ini pun memicu beragam reaksi dari warganet, mengingat latar belakang Ronaldo dan Srinivas yang berasal dari dua dunia berbeda, yakni sepak bola dan teknologi. Meski demikian, Srinivas mengungkapkan

bawa semangat, ambisi, dan rasa ingin tahu Ronaldo telah lama menginspirasinya.

Ronaldo sendiri menyampaikan bahwa dorongan untuk selalu menjadi lebih baik dari hari sebelumnya merupakan prinsip yang mendasari seluruh pencapaiannya. Ia menegaskan bahwa setiap keberhasilan dalam kariernya lahir dari upaya terus-menerus untuk memecahkan rekord pribadi dan meningkatkan standar diri.

Saat ini, Ronaldo menetap di Arab Saudi dan tercatat memiliki kekayaan bersih sekitar 1,4 miliar dolar AS atau setara Rp 23,3 triliun, berdasarkan Bloomberg Billionaires Index. Selain karier sepak bola, ia aktif berinvestasi, terutama di Portugal. Portofolio bisnisnya mencakup berbagai sektor,

mula dari akuisisi Lisboa Racket Center pada 2024, jaringan hotel, pusat kebugaran, hingga perusahaan media.

Sebagai langkah awal kerja sama dengan Perplexity AI, perusahaan tersebut memperkenalkan fitur baru bernama Ronaldo Hub. Fitur ini memungkinkan pengguna mengakses foto-foto eksklusif dari arsip pribadi Ronaldo yang belum pernah dipublikasikan sebelumnya. Selain itu, penggemar dapat menjelajahi statistik mendalam dan mengajukan pertanyaan langsung terkait perjalanan karier sang legenda, sehingga pengalaman penggemar menjadi lebih dekat dan personal.

Perplexity AI sendiri merupakan startup kecerdasan buatan yang mengembangkan chatbot, mesin pencari berbasis AI, serta peramban internet bernama Comet. Platform ini dikenal melalui mesin pencari berteknologi AI yang mampu menyajikan jawaban langsung lengkap dengan atribusi sumber, sehingga dinilai sebagai penantang dominasi Google di ranah pencarian informasi digital.

Didirikan pada 2022, Perplexity AI kini memiliki valuasi mencapai 20 miliar dolar AS setelah memperoleh pendanaan sebesar 200 juta dolar AS pada September 2025.

Bagaimana Cara Kerjanya

Perplexity AI merupakan platform pencari informasi berbasis kecerdasan buatan yang dirancang untuk memberikan jawaban cepat, akurat, dan

mendalam. Teknologi ini mengandalkan pemrosesan bahasa alami (Natural Language Processing/NLP) dan machine learning untuk memahami pertanyaan pengguna secara alami, tanpa perlu kata kunci khusus seperti pada mesin pencari konvensional.

Berbeda dari mesin pencari tradisional yang menampilkan daftar tautan, Perplexity AI merangkum informasi dari berbagai sumber terpercaya dan menyajikannya dalam bentuk narasi yang mudah dipahami, lengkap dengan referensi yang dapat diverifikasi.

Jika dibandingkan dengan ChatGPT, Perplexity AI memiliki fokus yang berbeda. ChatGPT dikembangkan untuk menghasilkan percakapan yang fleksibel dan kreatif, cocok untuk penulisan konten, dialog, hingga pemrograman. Sementara itu, Perplexity AI lebih diarahkan pada pencarian fakta dan riset ringan, dengan jawaban berbasis sumber kredibel dan berbagai perspektif analitis.

Perplexity AI dilengkapi sejumlah fitur utama, antara lain kemampuan memahami bahasa manusia secara natural, akses ke basis data pengetahuan yang luas seperti artikel ilmiah, buku, dan situs terpercaya, serta penyajian analisis mendalam dengan berbagai sudut pandang.

Sistem ini juga terus belajar dari interaksi pengguna untuk meningkatkan kualitas jawabannya dan memungkinkan percakapan berkelanjutan agar informasi yang diperoleh semakin spesifik. Keunggulan Perplexity AI meliputi respons yang cepat, antarmuka sederhana, fleksibilitas topik, serta kemampuannya menjawab pertanyaan faktual secara ringkas dan akurat.(ist/dya)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan TODAY

BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** GATOT SUNARKO | **JOMBANG :** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO :** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO-SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | **ISKANDAR Z. I MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN | **TRENGALEK:** TINA W I NGAWI: DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN | **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN | **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | MARKETING COMMUNICATION JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | SEKERTARIS FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN | ALAMAT REDAKSI JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | TELP 031-87854491 | PENERBIT PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | ALAMAT PERCETAKAN SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | TELP IKLAN 031-87854491 | NIB 91205006801134 | HARGA IKLAN RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap berita dilengkapi dengan tanda pengenal kewbartan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal kewbartan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



MEDIA TERVERIFIKASI



Color of
the Year
2026

Cloud Dancer
11-4201



Warna Tahun 2026 Bak Awan Berdansa

Menjelang tahun baru, berbagai tren juga ikut berputar termasuk dunia desain dan fesyen. Tren warna-warna terbaru akan menjadi pusat perhatian atau kiblat dalam setahun ke depan. Terbaru, Pantone Color Institute merilis Color of the Year 2026 yang diprediksi sebagai tren warna kekinian yakni Cloud dancer atau warna putih seperti awan berdansa.

Cloud dancer hadir sebagai warna utama yang akan mendominasi tren warna 2026. Warna ini merepresentasikan ketenangan, kelapangan, dan kejernihan visual, seolah memberi ruang bagi mata dan

pikiran untuk kembali bernapas.

Institut ini, yang dianggap sebagai otoritas terkemuka dalam hal warna, meramalkan tren, dan memberi saran kepada merek, menggambarkan warna tersebut sebagai warna putih bergelombang dan seimbang yang dijewi oleh rasa tenang.

"Seiring menguatnya cengkeraman teknologi dalam kehidupan sehari-hari, Cloud Dancer mewakili pengaruh yang menenangkan di tengah masyarakat yang hingar bingar, menemukan kembali nilai dari pertimbangan yang terukur dan refleksi yang tenang," ujar Leatrice Eiseman, direktur eksekutif institut tersebut.

"Warna diasosiasikan dengan awal yang baru dan menandakan keinginan kita untuk memulai yang baru," tambahnya Eiseman.

Laurie Pressman, wakil presiden institut tersebut mengatakan segala sesuatunya disaring melalui lensa warna. "Jadi, setiap tahun sejak 1999, program ini berusaha untuk menyoroti bagaimana apa yang terjadi dalam budaya makro kita pada suatu saat diekspresikan melalui bahasa warna," katanya.

Untuk memilih warna tahun ini, mereka menyaring referensi budaya, politik, dan gaya terkini, menentukan keluarga warna, lalu berfokus pada rona warna yang tepat dengan memperhatikan juga namanya dengan saksama.

"Nama warna itu penting. Begitu Anda mendengar sebuah nama yang menggambarkan warna, Anda langsung membayangkannya," kata Pressman.

Nuansa putih yang tepat ini, dengan keseimbangan yang seimbang

antara nuansa dingin dan hangat, dipilih dengan cermat.

"Seandainya kami memilih warna putih yang lebih terang secara optik, hal itu tidak hanya menghilangkan kesan alami, kejujuran, dan autentisitas yang kami cari tetapi juga hampir mencerminkan sterilitas dan isolasionalisme, karena warnanya dingin," ujarnya.

Meskipun berbagai nuansa putih telah lama hadir di mana-mana dalam dunia mode, Cloud Dancer secara khusus mewujudkan siluet yang mengembang dan kain alami seperti bulu.

Beberapa tren ini sudah terlihat. Banyak bulu ditampilkan di Met Gala tahun ini, termasuk, yang paling berkesan, pada ekor gaun putih Diana Ross yang luar biasa sepanjang 5,5 meter.

Gaun Louis Vuitton Emma Stone di Festival Film Venesia menampilkan keliman gelembung, sementara penyanyi-penulis lagu Rosalía menyukai desain putih yang ringan dan bersih saat mempromosikan albumnya yang mendapat pujian kritis, "Lux", bulan lalu.

Dalam desain interior, Eiseman menggambarkan Cloud Dancer sebagai kejernihan tanpa dingin, struktur tanpa kekerasan, yang cocok dipadukan dengan material alami seperti kayu dan batu.

Pilihan sebelumnya untuk Warna Tahun Ini versi Pantone adalah Mocha Mousse di tahun 2025, yakni cokelat lembut yang diresapi kehangatan sensorik dan menenangkan, dan Peach Fuzz, nada ringan dan buah yang membangkitkan kedamaian dan ketenangan, di tahun 2024. (wud ist/dya)

Color of
the Year
2026

PANTONE
Cloud Dancer

Aplikasi Utama Warna Cloud Dancer

Desain Interior:

Memberikan kejernihan tanpa dingin, menciptakan ruang yang supotif, tenang, nyaman, dan mudah dipadukan dengan material alami seperti kayu dan batu.

Fashion:

Menjadi warna dasar yang aman, minimalis, elegan, dan serbaguna, bisa dipakai sendiri atau sebagai latar untuk membuat warna lain lebih menonjol.

Kesan Psikologis:

Mewakili kanvas kosong untuk memulai kembali, meredakan tekanan, memberi ruang mental, serta menjadi fondasi untuk inovasi.

Cara Menggunakan Cloud Dancer dalam Desain

Dasar Minimalis:

Gunakan sebagai warna dinding utama untuk menciptakan kesan bersih, modern, dan lapang.

Padu Padan:

Kombinasikan dengan warna-warna pendamping tren 2026 seperti Lemon Icing, Pink Lemonade, atau Mountain Trail untuk tampilan yang lebih hidup.

Fungsi dan Perasaan:

Ciptakan atmosfer yang tenang sekali gus lapang, mengedepankan keseimbangan antara fungsi dan emosi.

Jaksa-jaksa ...dari hal 1

Komisi Kejaksaan angkat suara soal operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang menjerat beberapa jaksa. Dari operasi di tiga daerah selama 17-18 Desember 2025, KPK menjarang sejumlah penegak hukum dari Kejaksaan.

Komisioner Komisi Kejaksaan, Nurokhman mengatakan, peristiwa tersebut membuktikan adanya permasalahan dalam pengawasan di internal Kejaksaan. "Indikator kegagalan pengawasan melekat," ujar Nurokhman dalam keterangan tertulisnya Minggu (21/12/2025).

Menurut Nurokhman, OTT terhadap para jaksa tersebut tidak bisa dipandang secara kasuistik. Kasus tersebut justru mencerminkan adanya persoalan dalam fungsi pengawasan serta pembinaan di lingkungan Kejaksaan.

Nurokhman mendesak agar para jaksa yang terjerat OTT KPK tersebut harus ditindak secara tegas dan menyeluruh. "Oknum jaksa yang terjaring OTT harus diproses pidana dan diberhentikan dari institusi," ucap Nurokhman.

Komisi Kejaksaan juga mendorong pemberian sanksi pidana bagi jaksa secara menyeluruh. Perbaikan harus dilakukan secara sistemik, termasuk lewat penegakan disiplin etika serta penerapan hukum yang konsisten dan tidak pandang bulu.

Jumat lalu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna menyatakan prihatin ada beberapa jaksa yang terjaring dalam OTT KPK. "Pimpinan mendukung upaya dalam langkah membersihkan institusi dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab," kata Anang pada Jumat (19/12/2025).

Selain OTT di Banten pada Rabu (17/12/2025) sore, KPK juga menggelar operasi senyap di Kalimantan Selatan dan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Kamis (18/12/2025). Dalam operasi di Banten, KPK meringkus sembilan orang yang terdiri dari seorang jaksa berinisial RZ, penasihat hukum, serta pihak swasta. Dua jaksa lain juga disebut berkaitan dalam kasus tersebut, masing-masing berinisial RVS dan HMK.

Sumber menyebutkan, OTT tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan terhadap seorang warga negara asing asal Korea Selatan dalam penanganan perkara di Kabupaten Tangerang.

KPK kembali menangkap enam orang dalam operasi senyap yang dilakukan di Kalimantan Selatan, tiga di antaranya pejabat Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara. Mereka adalah Kepala Kejaksaan Albertinus

Parlinggoman Napitupulu, Kepala Seksi Intelijen Asis Budianto, dan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Tri Taruna Fariadi.

Ketiganya dijadikan tersangka karena diduga melakukannya pemerasan. "Penetapan tersangka ini setelah ada kecukupan dua alat bukti," kata Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu pada Sabtu (20/12/2025).

Dalam OTT di Bekasi, KPK menjarang Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang. Operasi itu berkaitan dengan kasus dugaan suap dalam paket proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi. Dalam kasus dugaan suap ini, KPK juga telah menyegelet rumah pribadi Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi Eddy Sumarman di Cikarang. Penyegelet rumah Eddy ini dikonfirmasi oleh juri bicara KPK, Budi Prasetyo.

Penjelasan Kejaksaan

Sementara, Kejaksaan Agung (Kejagung) mengatakan sudah mencopot Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara (HSU) Albertinus P Napitupulu (APN), Kasi Intel Kejari HSU Asis Budianto (ASB) dan Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datuun) Taruna Fariadi (TAR) dari jabatannya. Pencopotan dilakukan setelah ketiganya menjadi tersangka di KPK.

"Sudah copot dari jabatannya dan dinonaktifkan sementara status PNS pegawai kejaksaannya sampai mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap," kata Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna kepada wartawan, Minggu (21/12/2025).

Anang menyerahkan pengusutan kasus dugaan pemerasan itu kepada KPK. Dia memastikan kejaksaan tak akan ikut campur. "Tidak akan (intervensi)," ujar Anang.



Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang bersama ayahnya H. M. Kunang (kiri) mengenakan rompi tahanan dihadirkan saat konferensi pers usai terjaring operasi tangkap tangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (20/12/2025). (dok. ant)

Bupati Bekasi dan Ayahnya Kolaborasi 'Ijon' Proyek

KEHARMONISAN hubungan ayah dan anak sejatinya patut diapresiasi. Namun, menjadi persoalan serius ketika kekompakannya tersebut justru dimanfaatkan untuk merampok keuangan negara. Hal itu tercermin dari kasus yang menjerat Bupati Bekasi Ade Kuswara bersama ayahnya, HM Kunang.

Adapun Noel diperlakukan sebagai tersangka bersama 10 orang lainnya terkait kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3 di Kemnaker.

"Dalam penyidikan perkara ini, dari identifikasi oleh penyidik melalui rekening para tersangka, dugaan tindak pemerasan yang dilakukan mencapai Rp 201 miliar untuk periode 2020-2025," ujar juri bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Kamis (18/12/2025).

"Jumlah tersebut belum ter-

masuk pemberian tunai ataupun dalam bentuk barang seperti mobil, motor, fasilitas pemberangkatan ibadah haji, umrah, dan lain-lain," jelas dia.

Adapun pada Kamis, KPK telah melimpahkan tersangka dan barang bukti atau tahap II ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).

"Hari ini, penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan, telah dinyatakan lengkap atau P21, dan limpa ke tahap penuntutan," ucap Budi.

"Di mana penyidikan telah selesai melaksanakan proses tahap II, dengan penyerahan barang bukti dan 11 orang tersangka kepada tim Jaksa Penuntut Umum (JPU)," imbuhnya.

Dengan pelimpahan itu, kata Budi, JPU selanjutnya akan

Anang juga menyayangkan perbuatan ketiga oknum jaksa itu. Dia berharap anggota Korps Adhyaksa lain tetap menjaga integritas.

"Kepada jaksa jaksa di daerah agar tetap semangat menjaga integritas sebagai penegak hukum, jangan patah semangat," ujarnya.

Anang juga mengaku tak tahu di mana Taruna Fariadi yang kini masih diburu KPK. Dia menjamin Kejagung akan membantu penyidik KPK.

"Kita juga akan cari, kita pasti membantu KPK. Kalau memang ada, kita akan serahkan kepada penyidik KPK," ujar Anang.

Terpisah, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tangerang, Doni Saputra, membenarkan bahwa Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Pidum) Kejari Tangerang HMK ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung RI.

Penetapan tersangka tersebut berkaitan dengan penanganan perkara pidana pidana umum yang melibatkan terdakwa warga negara asing (WNA) asal Korea Selatan.

"Perkara ini memang sudah ditangani oleh Kejaksaan Agung dan telah diterbitkan surat perintah penyidikan (sprindik). Dalam perkara tersebut, telah ditetapkan tersangka HMK bersama tersangka lainnya berinisial RV dan RZ," ujar Doni kepada wartawan. (gus,rls,tmo,kcm/dya)

menyusun surat dakwaan dan Noel dkk akan segera disidang.

"Selanjutnya, JPU memiliki waktu paling lama 14 hari kerja untuk menyusun surat dakwaan. Untuk kemudian, berkas perkara akan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) guna proses persidangan," tutur Budi.

Adapun usai pelimpahan itu, Noel menyebut dirinya bersama tersangka lain tinggal menunggu jadwal persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Noel mengaku siap menghadapi proses itu. Hal itu disampaikan Noel saat tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (18/12/2025). Noel terlihat datang menggunakan syal putih dilengkapi kopiah hitam di kepala.

"Harus siaplah (P21 hari ini). Masa nggak siap. Petarung di mana pun harus siap," ujar Noel di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (18/12/2025).

Menurut Noel, kasus korupsi yang dituduhkan kepadanya tidak memenuhi unsur adanya kerugian keuangan negara. Namun, Noel tak merinci lebih jauh terkait hal ini. "Enggak lah, ya masa ada kerugian negaranya," sambung dia. (gus,kun,ant/dya)



SEGENAP PIMPINAN DAN STAF DPRD KOTA
SURABAYA MENGUCAPKAN

Selamat Hari
NATAL 2025

25 DESEMBER 2025



Adi Sutarwijono

Ketua DPRD Kota Surabaya

Bahtiar Rifai

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya

Laila Mufidah

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya

Arif Fathoni

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya